

## ABSTRAK

Pembangunan tidak selalu memiliki dampak positif tapi juga memiliki dampak negative, yang diterima oleh masyarakat sekitar. Seperti halnya pembangunan yang dilakukan di area kompleks makam Gus Dur, dimana semenjak dibangunnya area parker khusus bagi para peziarah maka merubah jalur pejalan kaki yang akan berziarah kesana dan akibatnya berdampak pada para pedagang yang berada di jalur yang lama. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pola hubungan antara wakil dan konstituen dalam menangani masalah tersebut, selain itu juga berusaha untuk melihat masalah apa saja yang dihadapi dalam melakukan hubungan antara wakil dan konstituen. Atas dasar itu maka rumusan masalah yang digunakan adalah. *Pertama*, bagaimana para pedagang makam Gus Dur menyampaikan aspirasi mereka ke DPRD Kabupaten Jombang. *Kedua*, apa saja kendala dalam melakukan tindak representasi tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori representasi politik, dimana teori ini membagi model-model representasi menjadi empat bagian, yaitu representasi formalistic, representasi deskriptif, representasi simbolis dan representasi substantive. Dimana pengkategorisannya tergantung apa saja tindakan yang dilakukan antara wakil dan konstituen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dimana peneliti mencoba untuk menggambarkan kondisi representasi yang dilakukan oleh para elite pemerintah dan bagaimana pula gambaran dari para pedagang yang direpresentasikan tersebut. Metodologi kualitatif berusaha untuk menggambarkan, menjelaskan dan menangkap fenomena-fenomena sosial-politik yang menarik dalam hubungan representasi ini. Oleh sebab itu peneliti lebih memilih menggunakan metodologi penelitian kualitatif dalam menangani fenomena ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proyek pembangunan area parker makam Gus Dur ini merupakan proyek kerjasama antara Pemerintahan Kabupaten Jombang, Pemerintahan Provinsi Jatim dan Pemerintahan Pusat, oleh sebab itu diperoleh tindakan antara wakil dan konstituen berupa: mendapat aspirasi, menampung aspirasi, melakukan kenjungan dan *hearing*, menyampaikan keprihatin terkait dan mengawal jalannya tuntutan. Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh pihak DPRD Kabupaten Jombang sendiri adalah, karena pembangunan lapak bagi para pedagang bukanlah tanggungjawab dari pemerintahan Jombang melainkan tanggungjawab Pemerintahan Provinsi dan Pusat, sehingga perepresentasian yang dilakukan tidak bisa selancar jika berurusan dengan *elite* Jombang sendiri.

*Kata kunci: pembangunan, representasi, pedagang, makam Gus Dur.*